

# BELAJAR DARI DESA: PKK SEBAGAI ORGANISASI GERAKAN PEREMPUAN

*Audra Jovani*

Prodi Ilmu Politik, Fisipol-Universitas Kristen Indonesia

[audra.jovani@yahoo.com](mailto:audra.jovani@yahoo.com)

## **Abstract**

*The family is the smallest unit in society that have significant importance in the development process, women have an important role in shaping dignified families and foster families. Government and State can learn from women about how to manage or make the 'desa' as a place to work as well as home. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) is an women's movement organization that make a real contribution to the State of trans boundary strata, ethnicity, and religion with family as a priority. Members of PKK are a partner with government and community organizations that serve as facilitator, planners, implementers, controllers on each division for the implementation of the Ten PKK Programs.*

**Keywords : PKK, Women's Movement, Participation, Village.**

## **Abstrak**

*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai arti penting dalam proses pembangunan, perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk keluarga yang bermartabat, membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin. Negara dapat belajar dari perempuan tentang bagaimana mengelola atau menjadikan desa sebagai tempat berkarya sekaligus rumah. PKK merupakan organisasi gerakan perempuan dalam memberikan kontribusi nyata bagi negara melintasi batas kelas, etnis, agama dengan prioritas menghasilkan keluarga yang berkualitas. Tim PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing bidang demi terlaksananya Sepuluh Program PKK.*

**Kata kunci: PKK, Gerakan Perempuan, Partisipasi, Desa**

## **Pendahuluan**

PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar *Home Economic* di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 Segi Kehidupan Keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS) sampai sekarang. Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa Salaman Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya daerah Dieng Kabupaten Wonosobo diantara mereka banyak yang menderita Honger Odeem (HO). Kenyataan itu menyentuh hati Ibu Isriati Moenadi, sebagai Istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, beliau merasa bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa dan Kelurahan. Dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur Isteri Pimpinan Daerah, Tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK secara intensif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1992 Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor: SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Sejak tahun 1974 Ketua PKK Jawa Tengah Ibu Kardinah Soepardjo Rustam banyak menerima tamu-tamu dari Luar Negeri seperti; Pakistan, Burma, Malaysia dan lain-lainnya untuk belajar mengenai PKK. Pada tahun 1978 Gubernur Jawa Tengah Bapak Soepardjo Roestam melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang hasil Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok PKK menjadi 10 Program Pokok PKK yang sampai sekarang menjadi program Gerakan PKK.<sup>1</sup>

Tujuan Gerakan PKK untuk mencapai keluarga sejahtera dengan tidak membedakan golongan, agama, partai dan lain-lain . Hal ini menarik perhatian Pemerintah yang selanjutnya Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diatur dan dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980, tentang Perubahan LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan PKK sebagai Seksi ke 10 di LKMD. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1982, Tim Penggerak PKK Pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, Isteri Menteri Dalam Negeri pada tahun 1982. Sebagai langkah selanjutnya, diadakan pementapan Gerakan PKK baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya maupun program kerja dan administrasi melalui Pelatihan, Orientasi, RAKON dan RAKERNAS. RAKERNAS I PKK diadakan pada bulan Maret 1982. Selanjutnya pada tahun 1983 dibawah pimpinan Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, melaksanakan RAKERNAS II PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 Program Pokok PKK nya. Setiap tahun diadakan Rapat Konsultasi, lima tahun sekali diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PKK. Kemudian pada Sidang Umum MPR Tahun 1983, berdasarkan TAP MPR No. II/ MPR/1983 tentang GBHN, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan Peranan Wanita Dalam Pembangunan. Pada tahun 1984 Menteri Dalam

---

<sup>1</sup> “Sejarah Singkat PKK” diakses dari <http://www.tp-pkkpusat.org>, pada tanggal 2 Mei 2016

Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas Gerakan PKK dan ketentuan atribut-atributnya.<sup>2</sup>

Tahun 1987 atas persetujuan Presiden RI dibentuk Kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma, guna meningkatkan pembinaan warga dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan mulai tahun 1988 PKK mendapatkan penghargaan-penghargaan *Internasional seperti Maurice Pate, Sasakawa Health Price*, maupun penghargaan tingkat nasional untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini antara lain dalam bidang; kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, lingkungan hidup dan lainnya. RAKERNAS III PKK dilaksanakan pada saat dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Kardinah Soepardjo Rustam pada tahun 1988, memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika. Pada tahun 1993 dalam RAKERNAS IV PKK, yang dipimpin oleh Ibu Ketua Umum Ny. Odiana Rudini telah memutuskan untuk "MENETAPKAN TANGGAL 27 DESEMBER SEBAGAI HARI KESATUAN GERAK PKK", yang diperingati setiap tahun. Pada bulan Desember 1997 menyelenggarakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang diikuti oleh Kader-kader PKK dari 27 provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan. RAKERNAS V diadakan pada tahun 1998 dipimpin oleh Ketua Umum Ny. Emy Yogie S.M.<sup>3</sup>

Dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S.M selaku Pembina PKK memberikan penghargaan kepada Pelindung, Penasehat, Kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15 tahun dan 10 tahun tanpa terhenti.

1. Medali Tertinggi disebut PARAMAHITA NUGRAHA.
2. Medali Utama disebut ADHI BHAKTI UTAMA.
3. Medali Madya disebut ADHI BHAKTI MADYA.

Selanjutnya TP PKK Pusat pada periode 1998 – 2005 dipimpin oleh :

1. Ibu Utari Hartono
2. Ibu Endang Syarwan Hamid
3. Ibu Suryadi Sudirdja
4. Ibu R.A. Dewi Hari Sabarno

Sesuai dengan Era Reformasi dan GBHN 1999 adanya paradigma baru pembangunan serta Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka Tim

---

<sup>2</sup> "Tujuan Gerakan PKK" diakses dari <http://www.tp-pkkpusat.org>, pada tanggal 2 Mei 2016

<sup>3</sup> "Penghargaan PKK" diakses dari <http://www.tp-pkkpusat.org>, pada tanggal 2 Mei 2016

Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 02 Nopember 2000 di Bandung, yang dipimpin oleh Ibu Suryadi Sudirdja, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain, adalah pengertian dan nomenklatur Gerakan PKK berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK., dan adanya Badan Penyantun TP PKK disemua tingkatan.

Untuk upaya upaya peningkatan, pembinaan PKK maka diadakan :

1. Pemetaan UP2K PKK pada saat dipimpin oleh Ibu Endang Syarwan Hamid
2. Lomba Lomba Kesatua Gerak PKK- KB- Kesehatan

Hasil Kesepakatan Rakernasub PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dasar Kepmendagri tersebut disusunlah Pedoman Umum Gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan Gerakan PKK, sampai saat ini. Pada tahun 2005 TP PKK Pusat mengadakan Rakernas VI PKK dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Susiyati Ma'ruf menetapkan perubahan nama badabn Penyantun PKK menjadi Dewan Penyantun PKK, serta adanya Seragam Nasional PKK. Sejak Tahun 2009 Ketua Umum TP PKK adalah Ibu Hj. Vita Gamawan Fauzi, SH, dan pada Tahun 2010 melaksanakan Rakernas VII, dengan hasil kesepakatan penetapan perubahan Hari Kesatuan Gerak PKK menjadi tanggal 4 Maret.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas mengenai PKK sebagai gerakan perempuan dan bagaimana bangsa ini dapat belajar dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan perempuan yang hampir semua kegiatannya dilakukan oleh perempuan di desa.

## **Pembahasan**

### **Tinjauan Pustaka**

#### ***Gerakan perempuan***

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.<sup>5</sup> Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan

---

<sup>4</sup> “Reposisi Gerakan PKK” diakses dari <http://www.tp-pkkpusat.org>, pada tanggal 2 Mei 2016.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Pasal 2 Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan wadah yang diberikan oleh pemerintah untuk perempuan. Pengelolaannya mulai dari lingkup terendah berupa satuan pokok kerja (pokja) hingga tingkat nasional dibawah naungan menteri dalam negeri. PKK juga dikelola oleh perempuan-perempuan akar rumput (*grass root*) yang menandakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKK juga dapat dimanfaatkan langsung oleh perempuan yang aktif tergabung dalam PKK diseluruh tingkatan. Keunggulan dari PKK adalah anggotanya adalah seluruh perempuan (istri) yang keluarganya terdaftar dalam kartu keluarga dan kependudukan. PKK tidak memberikan syarat anggota yang berpartisipasi memiliki jenjang pendidikan atau memiliki pengalaman.

Dalam PKK siapapun perempuan, berlatarbelakang pendidikan apapun, beragama, dan bersuku apapun diizinkan untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan. PKK hanya memberikan kewajiban berupa pengamalan sepuluh program pokok yang kemudian bisa dikembangkan oleh anggotanya sesuai dengan potensi dan sumber yang tersedia di masing-masing wilayah.

### ***Partisipasi***

Menurut Herbert McClosky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Herbert McClosky, *Political Participation, International Encyclopedia of the Social Sciences, ed.ke-2*, dalam Miriam Budiardjo. 2013.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.Hal. 367.

Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>7</sup> Definisi Partisipasi menurut Mikklesen adalah sebagai berikut ini<sup>8</sup>: *Pertama*, partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. *Kedua*, partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. *Ketiga*, partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. *Keempat*, partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. *Kelima*, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

### ***Desa***

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Desa berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Desa pun merupakan wadah pemberdayaan warga negara sebagai subjek pembangunan. Melalui UU Desa terdapat panduan dalam memuat dan mengembangkan kemajemukan, dan dapat memberdayakan perempuan.

---

<sup>7</sup> Samuel P Huntington dan Joao M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* dalam Miriam Budiardjo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 368.

<sup>8</sup> Glenda A. Bayoa, “Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera (Suatu Studi Analisa Dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua No.9 Tahun 2008 Di Kampung Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen)” dalam *Governance Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat*, Vol 5 Tahun 2013. Manado. Unsrat. Hal. 6

<sup>9</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa diakses dari <http://www.dpr.go.id> pada tanggal 2 Mei 2016.

## **Analisa**

### ***PKK Sebagai Mitra Pemerintah***

Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan (Rakernas VII PKK, 2010)<sup>10</sup>

Dalam hasil Rakernas dijelaskan bahwa pemberdayaan keluarga yang dimaksud adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri. Konsep kesejahteraan keluarga adalah konsep tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Tim PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing bidang agar terlaksananya program PKK. Secara nasional, PKK berkantor di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dipimpin oleh istri menteri Dalam Negeri. Tim penggerak PKK diketuai oleh istri kepala daerah yang sedang menjabat baik di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga dusun.

### **Sepuluh Program PKK**

Sebagai mitra pemerintah, Tim penggerak PKK wajib melaksanakan Sepuluh Program PKK Pokok yaitu<sup>11</sup>:

#### **1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila**

Berupaya menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemahaman secara terpadu seperti: (a) Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang mencakup lima unsur yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas kebenaran Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara; (b) Kesadaran hukum (Kadarkum) untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan untuk pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *trafficking* (perdagangan orang), perlindungan anak, penyalahgunaan narkoba,

---

<sup>10</sup> Ani W. Soetjipto dan Shelly Adelina. 2013. *Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK*. Jakarta. Program Studi Kajian Gender dan Yayasan TIFA. Hal. 51.

<sup>11</sup> *Idem*. Hal. 54-61.

dan lain sebagainya; (c) Pola asih anak dan remaja dengan menumbuhkan dan membangun perilaku, budi pekerti, sopan santun di dalam keluarga sesuai budaya bangsa; (d) Pemahaman dan Keterampilan Hidup yaitu usaha menumbuhkan kesadaran orangtua dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba; (e) Pemahaman tertib administrasi dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di keluarga.

## 2. Gotong Royong

Membangun kerja sama yang baik antarsesama keluarga, warga dan kelompok untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Sifat gotong royong sudah ada dalam budaya masyarakat di Indonesia seperti:

- a) Jawa Tengah dan Jawa Timur: *selapanan, patungan, lebotan, arisan*
- b) Jawa Timur: *resaya, tabor*
- c) Jawa Barat: *rereyongan, sarumpi*
- d) Bali: *subak, sekaha*
- e) NTB: *basuri, matag, siru*
- f) NTT: *arong, engko, gemoking*
- g) Lampung: *sakai-sembahyangan*
- h) Sumatera Utara: *marsi-dapara*
- i) Maluku: *pela-masori*
- j) Sulawesi Utara: *mapalus*
- k) Kalimantan: *puludow, pongerih*

## 3. Pangan

Bidang ini mendapat perhatian khusus dengan cara menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan pekarangan antara lain dengan menanam tumbuh-tumbuhan bermanfaat seperti sayur, umbi-umbian, buah-buahan dan bumbu-bumbu dapur, bahkan tanaman obat yang bisa menjadi apotek hidup atau tanaman obat keluarga (toga). Pembinaan teknis dilakukan dalam kerjasama dengan Dinas Pertanian agar warga memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang usaha horticultural dan agribisnis.

## 4. Sandang

PKK berupaya melestarikan dan menggalakkan produksi bahan dan corak pakaian yang menjadi kekayaan budaya lokal, berupa batik, tenun, lurik, songket dan lain sebagainya. Dengan ini juga mengikutsertakan warga dalam pameran dan lomba di tingkat lokal, nasional bahkan internasional.

PKK menjadi fasilitator untuk menjembatani hubungan dengan para pemerhati mode nasional, pengusaha dan dunia industry dan pariwisata. Hal utama dalam program sandang adalah upaya PKK membudidayakan perilaku berbusana sesuai dengan budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri.

#### 5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Melalui program ini PKK menggerakkan upaya pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu melalui pemugaran rumah layak huni terutama keluarga miskin dan pengungsi dengan asas tri bina (bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan) gotong royong serta mengupayakan bantuan dari instansi/dinas terkait, bank, swasta dan masyarakat.

Menumbuhkan kesadaran akan bahwa tinggal di daerah tegangan listrik tinggi, di bantaran sungai, timbunan sampah, tepian rel kereta api dan menumbuhkan kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah dan tanah, menghemat energi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam mengharmoniskan dan membahagiakan kehidupan berkeluarga. Bermitra dengan instansi/dinas terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Badan Bimas Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Perguruan Tinggi, dan lain-lain

#### 6. Pendidikan dan Ketrampilan

PKK memanfaatkan jalur pendidikan non-formal, program “wajib belajar” PKK menganjurkan keluarga untuk dapat memberikan pendidikan bagi putra-putrinya. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Sebagai mitra pemerintah PKK juga berperan dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB). PKK juga melaksanakan program keaksaraan fungsional, pelatihan yang dilakukan untuk membuat kerajinan tangan, produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual untuk meningkatkan penghasilan pendapatan keluarga.

PKK juga meningkatkan kejar Paket A, B dan C, pendidikan dasar Sembilan tahun, peningkatan penyuluhan, orientasi dan pelatihan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baca tulis, serta membudayakan minat baca masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Sudut Baca bekerja sama dengan instansi terkait.

#### 7. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Melaksanakan evaluasi UP2K-PKK dan mengadakan lomba UP2K untuk mengetahui progress pelaksanaan kegiatan UP2K-PKK di daerah-daerah. PKK juga memotivasi

keluarga agar menjadi anggota koperasi, memberikan pengetahuan tentang cara pemecahan masalah permodalan untuk kegiatan UP2K-PKK melalui APBD, Lembaga Keuangan Mikro yang ada baik yang bersifat bank seperti BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain-lain.

#### 8. Kesehatan

PKK menggerakkan terwujudnya Keluarga Sadar Gizi (Kadar-zi) dalam upaya menurunkan prevalensi anak balita kurang gizi yang mencakup:

- a) Gizi seimbang pada ibu hamil, ibu menyusui dan balita
- b) Kualitas gizi pada ibu hamil yang kekurangan energy kronis dengan mengukur lingkaran lengan atas
- c) Penanggulangan gangguan akibat kekurangan garam yodium
- d) Suplementasi zat gizi
- e) Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan
- f) Makanan pendamping ASI
- g) Pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia di posyandu

Selain itu, PKK membantu pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan, angka kematian bayi, angka kematian balita, kegiatan Posyandu melalui pelatihan, penyegaran dan pembinaan.

#### 9. Kelestarian Lingkungan Hidup

PKK menanamkan kesadaran tentang pengelolaan kamar mandi dan jamban keluarga, saluran pembuangan air limbah, penghematan air bersih dalam keluarga, pencegahan banjir dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, pembuatan lubang resapan untuk mencegah genangan air (biopori).

#### 10. Perencanaan Sehat

PKK meningkatkan kegiatan dalam penyuluhan tentang keluarga berencana, membiasakan menabung, menyelenggarakan peringatan hari keluarga nasional, penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin, mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga.

Kesepuluh program tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh Penggerak PKK yang berada di tingkat pusat sampai dengan tingkat dusun. Dan jelas disini bahwa Penggerak PKK merupakan gerakan perempuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam keluarga.

## **Penutup**

Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Oleh sebab itu, PKK dan Penggerak PKK pun dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, terlebih lagi dengan adanya Sepuluh Program yang telah diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan kualitas perempuan melalui gerakan PKK. Peran PKK tentu saja sangat bermanfaat bagi seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggerak PKK melalui Sepuluh Program tersebut. Dan sebagai mitra pemerintah, PKK telah menjalankan fungsinya terutama dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia sekaligus membuktikan bahwa perempuan sebagai penggerak PKK dapat diandalkan dan diperhitungkan.

## Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. 2013. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Glenda A. Bayoa. 2013 “*Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera (Suatu Studi Analisa Dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua No.9 Tahun 2008 Di Kampung Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen)*” dalam Governance Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Vol 5 Tahun 2013. Manado. Unsrat.
- Mardalis. 1995. Metode Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [www.tp-pkkpusat.org/](http://www.tp-pkkpusat.org/)